



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**POKOK-POKOK TANGGAPAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2021**

TANGGAL 23 AGUSTUS 2022

***Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
Merdeka!***

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Mahakuasa, atas nikmat dan kuasa-Nya, tahun ini, kita dapat kembali merasakan nikmatnya peringatan mensyukuri kemerdekaan dalam suasana yang khidmat dan meriah. Setelah dua tahun lebih pandemi, kini kita dapat melaksanakan kembali Upacara 17 Agustus secara fisik. Aneka lomba dan pentas seni rakyat, kembali mewarnai kegembiraan seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

Pekik "**Merdeka**" dan semboyan "**Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat**" riuh berkumandang memompakan semangat untuk terus menjaga semangat pemulihan ekonomi bangsa. Ini menandakan optimisme kita bersama bahwa dengan bersatu, seluruh komponen bangsa Indonesia, siap untuk terus membangun negeri menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Dalam atmosfer kegembiraan peringatan kemerdekaan yang masih kita rasakan, ijin kami untuk menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Juli 2022 yang lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan, apresiasi, dan masukan konstruktif terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR-RI atas pandangan, apresiasi, dan masukan tersebut, yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.

Perkenankan kami menyampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing fraksi, yaitu Anggota yang terhormat:

- 1) **Bapak H. Abidin Fikri, S.H., M.H.** mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP);
- 2) **Ibu Nurul Arifin, M.Si** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar);
- 3) **Ibu Susi Marleny Bachsin, S.E., M.M.** mewakili Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra);
- 4) **Bapak Moh. Haerul Amri, S.P.** mewakili Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem);
- 5) **Bapak Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.** mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB);
- 6) **Bapak Dr. H. Suhardi Duka, M.M.** mewakili Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat);
- 7) **Bapak Dr. Hermanto, S.E., M.M.** mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS);
- 8) **Bapak Athari Ghauthi Ardi** mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan
- 9) **Bapak Dr. Muhammad Aras, S.Pd., M.M.** mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi, di mana vaksinasi secara masif baru mulai dilakukan pada triwulan II dan triwulan III. Sementara itu, varian Covid-19 terus berubah, menjadi semakin menular dan semakin ganas. Masih jelas dalam ingatan kita kepanikan yang ditimbulkan oleh ancaman penularan varian Delta yang memuncak pada triwulan III tahun 2021. Dihadapkan dengan situasi ini, Pemerintah terpaksa harus melakukan beberapa kali pembatasan pergerakan manusia secara ketat (PPKM Darurat) untuk melindungi rakyat dari ancaman kematian dan kesehatan akibat Covid-19. Hal ini berakibat pada penurunan dan perlemahan aktivitas perekonomian. Dalam kondisi yang demikian, APBN Tahun Anggaran 2021 menjadi instrumen yang sangat penting dan sangat menentukan, baik dalam mengadakan vaksin dan mendanai program vaksinasi, memberikan bantalan sosial dengan bantuan ke masyarakat dan UMKM maupun untuk mendorong pemulihan ekonomi secara kontinyu dengan berbagai insentif bagi dunia usaha, termasuk insentif perpajakan.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi **catatan dan pandangan dari seluruh Fraksi** mengenai realisasi asumsi ekonomi makro yang belum sesuai asumsi pada APBN TA 2021, antara lain terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan rasio gini, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69 persen adalah salah satu pencapaian penting dalam pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 3,69 persen bukanlah kinerja yang buruk di tengah tingginya ketidakpastian akibat penyebaran kasus Covid-19 yang masih berfluktuasi selama tahun 2021 serta adanya kebijakan PPKM darurat untuk meredam lonjakan kasus Covid-19 penyebaran varian Delta di triwulan III tahun 2021.

PDB Indonesia tahun 2021 telah berhasil melampaui level pada periode pra-pandemi. Hal ini perlu dicatat, mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti: Thailand, Filipina, Malaysia, Mexico, Jerman, Perancis, Italia dan masih banyak negara lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, tingkat PDB per kapita Indonesia (dalam nominal) berhasil naik 8,6 persen, dari 57,3 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 62,2 juta rupiah di tahun 2021.

Tren pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga diikuti dengan perbaikan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level *single digit* 9,71 persen per September 2021, di mana sebelumnya, per September 2020 mencapai 10,19 persen.

Sementara itu, menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020-Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07 persen per Agustus 2020 menjadi 6,49 persen per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Capaian inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen, karena masih lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik. Meskipun demikian, pada paruh kedua tahun 2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan bahwa terdapat sinyal perbaikan permintaan seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung.

Penurunan kemiskinan dan rasio gini selalu menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan APBN. Pandemi Covid-19 berdampak pada melebarnya ketimpangan Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio gini pada September 2020 dan Maret 2021. Namun kerja keras kita semua merespons dengan kebijakan yang cepat dan tepat maka pada September 2021, ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai membaik yang ditunjukkan oleh penurunan rasio gini baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada F-PKB, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, dan F-PAN yang terus mendorong pemerintah untuk fokus pada pengendalian penyebaran Covid-19 sehingga mampu menjaga kontinuitas pemulihan perekonomian nasional. APBN TA 2021 menjadi instrumen yang luar biasa bekerja keras untuk berkinerja positif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Program PC-PEN yang tepat sasaran tentunya menjadi daya ungkit pemulihan aktivitas masyarakat dan percepatan pemulihan perekonomian. Pemerintah melalui program PC-PEN, terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak pandemi dengan memfokuskan alokasi anggaran pada sektor kesehatan, yang diutamakan untuk penanganan pandemi dan penguatan sistem kesehatan, termasuk percepatan program vaksinasi. Belanja perlindungan sosial juga diperluas untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelompok rentan yang terdampak. Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus, antara lain berupa insentif usaha agar perekonomian Indonesia tetap dapat berjalan dan tumbuh untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Pemerintah sepakat dengan pandangan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Demokrat, dan F-Partai Nasdem bahwa sepanjang tahun 2021 APBN telah menghadapi berbagai dinamika perekonomian domestik dan global yang menantang. Kinerja APBN TA 2021 juga telah mampu menghadapi dampak varian Delta Covid-19 yang menimbulkan guncangan baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Kami sepakat bahwa APBN TA 2021 dapat menjadi pegangan, referensi, serta literatur yang cukup lengkap sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan APBN TA 2022 dan pada periode selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa buku dalam rangka mendokumentasikan kebijakan yang diambil saat situasi pandemi. Buku-buku yang diterbitkan oleh Pemerintah antara lain berjudul: Covid-19 Catatan Linimasa Analisis Muda, Mengawal Akuntabilitas PC-PEN Tahun 2020, Mengarungi Badai Pandemi, Meramu Kebijakan Di tengah Pandemi Covid-19 dan, *Keeping Indonesia Safe From Covid-19 Pandemic*.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** terkait rasio, stimulus, reformasi dan isu lainnya terkait perpajakan, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Rasio perpajakan antara lain dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan nasional, dinamika harga komoditas, serta kebijakan perpajakan. Pada tahun 2020, rasio perpajakan mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh melemahnya ekonomi serta pembatasan sosial (PSBB) pada saat pandemi Covid-19. Melalui berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain pemberian insentif perpajakan dan adanya peningkatan harga komoditas dunia, di tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai pulih dan tumbuh sehingga mendorong terjadinya peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan. Rasio perpajakan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,11 persen terhadap PDB seiring dengan pemulihan ekonomi. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 8,33 persen. Selain itu, *tax buoyancy* tahun 2021 mencapai 2,24 yang didorong oleh pemulihan ekonomi nasional dan dampak kenaikan harga komoditas global seperti CPO, minerba, gas alam, serta komoditas lainnya.

Di samping itu, pada tahun 2021, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberian stimulus perpajakan dalam Program PEN, sebagai upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jenis insentif perpajakan yang diberikan masih relatif sama dengan tahun 2020, namun dengan cakupan sektor yang lebih selektif, yaitu insentif untuk Pajak Penjualan

Barang Mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor, PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, dan PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan reformasi perpajakan antara lain melalui implementasi UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP di tahun ini telah memberikan dampak peningkatan penerimaan negara, hal ini diharapkan terus mampu mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang sehat yaitu optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara serta dapat meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian yang berkeadilan. Implementasi UU HPP juga bertujuan memperluas basis pemajakan dengan melaksanakan penguatan sisi administrasi dan kebijakan perpajakan.

Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, dan F-Partai Demokrat bahwa Pemerintah harus berfokus pada pelaksanaan program prioritas dan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan Koperasi. Pemerintah senantiasa berupaya mendukung sektor-sektor tersebut bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan produktivitas sektor pangan dan peningkatan risiko *food insecurity*. Pada sektor kelautan dan perikanan, salah satu program Pemerintah dalam mengembalikan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di seluruh wilayah Indonesia adalah melalui Program Padat Karya. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mendukung program padat karya tersebut di antaranya yaitu Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam sebanyak 55 paket; Minapadi sebanyak 200 paket; dan Pengembangan Usaha garam Rakyat seluas 300 ha.

Selain itu, dukungan Pemerintah juga diberikan untuk UMKM, yaitu melalui Program PEN kluster dukungan UMKM dan Korporasi. Realisasi kluster ini mencapai Rp116,15 triliun atau 71,52 persen dari Pagu Rp162,40 triliun. Kluster ini antara lain dilaksanakan untuk Banpres Produktif untuk Usaha Mikro untuk 11,2 juta usaha, Subdisi Bunga KUR untuk 8,71 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur, dan PMN untuk badan usaha dengan total nilai Rp56,75 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Gerindra dan F-PKS** mengenai strategisnya peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dapat kami sampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah ketersediaan infrastruktur dasar (*physical capital*) sebagai modal pembangunan. Secara lebih spesifik, terdapat *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur dasar. Untuk itu TKDD, di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, hadir untuk memenuhi *gap* tersebut. *Gap* infrastruktur yang diisi oleh DAK Fisik adalah yang sifatnya *urgent*, antara lain infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan konektivitas, seperti jalan dan jembatan. Selain DAK Fisik, melalui DAK Nonfisik terdapat jenis dana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, antara lain melalui dana Pelayanan Kepariwisata dan dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM.

Menanggapi pandangan dari **F-PPP** mengenai pengaruh anggaran Dana Desa terhadap kemajuan desa dan pengentasan kemiskinan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pengentasan kemiskinan di desa. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, desa yang berstatus sangat tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 5.333 desa, telah turun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 14.074 desa. Sementara itu, desa tertinggal pada tahun 2021 adalah 15.935 desa, atau turun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 33.339 desa. Penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut menjadi salah satu bukti dampak positif adanya Dana Desa bagi kemajuan desa.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-PAN, F-PKB, F-Partai Nasdem, dan F-PKS** mengenai besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

SiLPA tahun 2021 sebesar Rp96,65 triliun lebih rendah dibandingkan SiLPA tahun 2020 yang sebesar Rp245,59 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja APBN yang lebih baik di tahun 2021 yaitu disebabkan oleh meningkatnya penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta penurunan pembiayaan utang. Penerimaan meningkat sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi sejalan proses pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong penerimaan perpajakan dan PNBP. Sedangkan, dari sisi belanja, upaya efisiensi dilakukan antara lain melalui gerakan *refocusing* anggaran dan upaya pengendalian belanja non-prioritas oleh

Kementerian/Lembaga. Dengan kondisi yang makin baik tersebut maka pembiayaan utang (*debt issuance*) tahun 2021 dapat diturunkan sebesar Rp306,9 triliun, yaitu dari Rp1.177,4 triliun (APBN) menjadi Rp870,5 triliun (realisasi), sebagai langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang, serta memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah. Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang pada 40,7 persen PDB atau di dalam batas aman sesuai UU Keuangan Negara.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dengan pengaturan penggunaannya dalam UU APBN juga berfungsi sebagai *fiscal buffer* bagi pelaksanaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah secara berkala melakukan perhitungan dan kalibrasi besaran SAL ideal dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan dan potensi kebutuhan pembiayaan. Untuk tahun 2021, penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan SAL sebesar Rp128,2 triliun.

SiLPA TA 2021 selanjutnya akan dimanfaatkan secara optimal dan efisien pada tahun anggaran 2022 maupun 2023 baik dalam kerangka dukungan likuiditas pemerintah (*cash management*) maupun dukungan pembiayaan (*debt management*) sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap pandangan **F-PAN, F-PKB, dan F-Partai Demokrat, F-PKS dan F-PPP** mengenai pengelolaan defisit dan utang, dapat kami jelaskan bahwa dalam APBN TA 2021, Pemerintah fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang meliputi reformasi APBN dan reformasi struktural. Reformasi APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas untuk menjaga kesehatan masyarakat dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakselerasi upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan. Kebijakan ini membawa konsekuensi pada peningkatan defisit karena kebutuhan belanja yang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk dapat mengelola dan menjaga tingkat defisit anggaran agar tetap terkendali dalam batas aman.

Kinerja pelaksanaan APBN TA 2022 menjadi modal positif menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Defisit APBN TA 2022 diperkirakan akan mencapai 3,92 persen terhadap PDB. *Outlook* tersebut menurun signifikan dari target APBN 2022 sebesar 4,85 persen.

Hal ini sejalan dengan langkah konsolidasi fiskal Pemerintah untuk menurunkan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS, dan F-PPP** agar Pemerintah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti dan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan *action plan* yang rinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, di samping melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi-Fraksi DPR RI kepada Pemerintah dalam mempertahankan opini WTP atas LKPP selama enam kali berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016 dan kerja keras Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah sekali lagi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPR-RI, karena secara umum dapat memahami dan mendukung kebijakan *extraordinary* yang diambil Pemerintah, demi efektifnya pelaksanaan APBN TA 2021. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah bersama DPR tersebut, terutama bertujuan agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat optimal APBN di masa pandemi Covid-19.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI secara lebih rinci, kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan Fraksi-Fraksi DPR-RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi setiap usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi dari rakyat Indonesia, sehingga

kepercayaan rakyat terhadap pemenuhan janji dan cita-cita Republik Indonesia tercinta akan senantiasa tetap terjaga.

Mari bersama kita terus bahu-membahu bekerja keras menjaga pemulihan ekonomi Indonesia, menuntaskan agenda reformasi untuk memperkuat struktur fundamental perekonomian dan mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju. **Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.**

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,

Salam Sehat untuk kita semua.

Merdeka!

Jakarta, 23 Agustus 2022

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,**

ttd

Sri Mulyani Indrawati